

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah barang milik daerah (BMD) di lingkup pemerintahan Indonesia adalah istilah yang erat kaitannya dengan aset Daerah. Menurut Sugiyanto (2018), BMD merupakan aset (harta) atau kekayaan milik daerah yang setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Adapun BMD yang merupakan salah satu wujud kekayaan daerah ini dapat diperoleh dari dana APBD ataupun metode perolehan lainnya yang dinilai sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena salah satu sumber dana untuk perolehan BMD berasal dari APBD, maka tak heran jika salah satu tujuan pengadaan BMD adalah terkait pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh unit pemerintahan daerah. Lebih lanjut mengenai BMD, Lampiran Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah menunjukkan bahwa BMD dapat berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Aset tetap yang merupakan salah satu wujud BMD adalah faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah (Apriadinihari *et al.*, 2020). Hal ini dapat tercermin dari kenyataan bahwa pada umumnya, aset tetap kerap

menjadi salah satu komponen terbesar dalam pos aset di Neraca suatu entitas—tak terkecuali untuk unit pemerintahan. Salah satu kasus yang sejalan dengan pernyataan tersebut dapat dilihat dari LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2020 yang memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar 24,06 triliun rupiah—69,52% dari total aset yang dimiliki. Selain dari porsi yang besar dalam laporan keuangan, signifikansi aset tetap sebagai salah satu aspek vital bagi Pemerintah dapat ditilik dari fungsi dan kegunaannya dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat dan juga pembangunan.

BMD memiliki peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, maka tentu BMD harus dikelola dengan baik, tertib, dan sistematis agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Senada dengan hal ini, Amerieska *et al.* (2018) juga menyampaikan bahwa Pemerintah harus mengelola aset/BMD dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan, dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain aspek ekonomis, kegiatan pengelolaan BMD juga harus memastikan bahwa konsep *value for money* dalam pengadaan BMD benar-benar terpenuhi. Alasan lain yang dapat mendasari pentingnya mengelola BMD—terutama yang berwujud aset tetap—adalah fakta bahwa meskipun transaksi terkait aset tetap relatif sedikit dibanding transaksi lainnya, transaksi terkait aset tetap umumnya dilakukan dalam nominal yang besar (Mulyadi, 2016). Karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa aset tetap bernilai tinggi yang diperoleh melalui dana anggaran memang

dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin—bukannya ditelantarkan dan disia-siakan begitu saja.

Namun demikian, isu terkait pengelolaan BMD dalam bentuk aset tetap masih umum ditemukan. Niu *et al.* (2017) mengemukakan bahwa ada berbagai studi yang membuktikan bahwa pada kenyataannya, pengelolaan aset daerah tidak mendapat begitu banyak perhatian dibanding dengan pengelolaan keuangan daerah meskipun kedua aspek ini sama pentingnya. Pernyataan ini diperkuat oleh Amerieska *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa ketidakpedulian akan pengelolaan aset ini tercermin dari catatan atas opini BPK yang hampir setiap tahun didominasi oleh masalah pengelolaan BMD. Isu terkait pengelolaan BMD ini memang masih dapat ditemukan bahkan di Daerah yang mendapat opini WTP atas LKPD-nya—salah satunya adalah Kalimantan Timur. Hanya dengan melihat Samarinda yang merupakan ibu kotanya saja, ada beberapa kasus terkait pengelolaan aset tetap yang kurang optimal seperti Hotel Atlet yang mengalami banyak kerusakan, pencurian material Jembatan Mahakam, dan Stadion Palaran yang sempat tak terurus dalam waktu lama setelah perhelatan PON 2008.

Meskipun dewasa ini Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu pengelolaan BMD, nyatanya belum semua isu dapat teratasi. Menyikapi hal ini, Penulis terdorong untuk melakukan penelitian terkait praktik riil pengelolaan BMD di daerah tempat tinggal Penulis—Samarinda. Penulis ingin mengetahui apakah perangkat daerah setempat telah menerapkan suatu sistem pengelolaan BMD sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan aspek *value for money* dan kepuasan masyarakat atas layanan yang mereka dapat serta meminimalkan terjadinya

permasalahan terkait pengelolaan BMD. Untuk penelitian ini, objek yang Penulis pilih adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur. Objek ini dipilih karena selain memenuhi kriteria sebagai perangkat daerah yang bertempat di Samarinda, Penulis juga memiliki ketertarikan terhadap aset tetap di objek tersebut, khususnya aset tetap lainnya dalam bentuk koleksi perpustakaan. Penulis ingin mengetahui apakah terdapat perlakuan khusus atau perbedaan signifikan dalam pengelolaan aset tetap tersebut. Sehubungan dengan latar belakang yang telah Penulis paparkan, Penulis mengajukan karya tulis tugas akhir dengan judul “Tinjauan atas Sistem Pengelolaan BMD dalam Bentuk Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang ingin Penulis ulas dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini:

- 1) Bagaimana cara kerja sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
- 2) Apa saja permasalahan, ancaman, dan risiko yang ditemui dalam penerapan sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur?
- 3) Apa saja pengendalian internal yang diterapkan dalam menghadapi isu terkait sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur?

- 4) Bagaimana kesesuaian implementasi sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan teori yang telah dipelajari di PKN STAN dan dari peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Berikut adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai Penulis melalui penulisan karya tulis tugas akhir ini:

- 1) Untuk mengetahui cara kerja sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Untuk mengetahui permasalahan, ancaman, dan risiko yang ditemui dalam penerapan sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 3) Untuk mengetahui pengendalian internal yang diterapkan dalam menghadapi isu terkait sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan teori yang telah dipelajari di PKN STAN dan dari peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dikarenakan topik mengenai pengelolaan BMD yang ingin diangkat Penulis merupakan topik yang cukup luas, Penulis memberikan batasan terkait pembahasan yang akan dilakukan melalui penulisan karya tulis tugas akhir ini. Pembahasan yang akan Penulis lakukan terbatas pada pengelolaan BMD dalam

bentuk aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ini, Penulis berharap agar hasil akhir karya tulis ini dapat membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat membantu baik Penulis maupun pembaca untuk memantapkan pemahaman teori fundamental, serta menambah dan memperdalam wawasan terkait sistem pengelolaan BMD—khususnya aset tetap. Penulis juga berharap karya tulis ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan maupun penelitian lebih lanjut terkait sistem pengelolaan BMD ke depannya.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat membantu Penulis dalam memahami bagaimana implementasi riil dari ilmu teoritis yang telah dipelajari Penulis di bangku perkuliahan. Selain itu, pemahaman dan pengalaman yang didapatkan selama penulisan karya tulis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi Penulis untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja.

b) Bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja, merancang perbaikan dan peningkatan mutu, serta menguji kesesuaian sistem pengelolaan BMD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan peraturan yang berlaku.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengulas dan mengembangkan gagasan terkait sistem pengelolaan BMD maupun aset tetap secara umum.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan karya tulis tugas akhir. Bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman dasar terkait topik sistem pengelolaan aset tetap yang ingin diangkat Penulis, serta urgensi dilakukannya ulasan terkait topik tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori dan peraturan terkait yang akan digunakan sebagai dasar dari peninjauan sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode pengumpulan data serta pembahasan dari hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan. Bab ini juga akan memaparkan gambaran

umum tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, data-data terkait pelaksanaan sistem pengelolaan aset tetap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta informasi lainnya yang dinilai relevan dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas implementasi sistem pengelolaan aset tetap pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.